

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Partai politik merupakan wadah atau sarana bagi warga negara dalam turut serta untuk berpartisipasi dalam proses pengelolaan Negara. Selain itu, partai politik juga merupakan sarana partisipasi politik masyarakat dalam mengembangkan kehidupan demokrasi untuk menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab.

Dewasa ini partai politik menjadi suatu keharusan dalam kehidupan politik modern yang demokratis. Sebagai suatu lembaga, partai politik pada hakikatnya dimaksudkan untuk memobilisasi rakyat, mewakili kepentingan tertentu, memberikan jalan kompromi bagi pendapat yang saling bersaing, serta menyediakan sarana sukses kepemimpinan politik secara absah dan damai.

Partai politik secara umum dikatakan sebagai satu kelompok yang terorganisir yang didalamnya diisi oleh anggota-anggota yang mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Dengan tujuan yang sama pula yaitu untuk memperoleh kekuasaan politik dan melalui kekuasaan itu, elemen politik melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.¹ Karena itu, partai politik dalam pengertian modern dapat didefinisikan sebagai kelompok atau organisasi yang mengajukan calon-calon untuk dijadikan menjadi pejabat publik yang dipilih oleh rakyat sehingga mengontrol atau mempengaruhi segala tindakan pemerintah.

¹ Taufik Hidayattulloh, 2017, “Perkembangan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Cimahi 2001-2011”, Skripsi.

Carl Frierich memberi batasan partai politik sebagai kelompok manusia yang terorganisasi secara stabil dengan tujuan untuk membuat atau mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan.

Keberadaan partai politik bukan hanya sebagai sarana masyarakat dalam berpartisipasi politik, melainkan dapat berfungsi sebagai sarana untuk mempersiapkan, memunculkan dan melahirkan pemimpin politik, bangsa dan negara.

Dengan demikian, partai politik merupakan perantara yang menghubungkan ideologi-ideologi sosial dan kekuatan-kekuatan politik terhadap lembaga-lembaga pemerintah yang resmi secara lebih luas.

Perkembangan demokrasi di Indonesia telah mengalami pasang surut, sebagaimana pendapat Miriam Budiardjo, menyebutkan bahwa perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dibagi dalam empat masa, yaitu:²

- a. Masa Republik Indonesia I (1945-1959), yaitu masa demokrasi (konstitusional) yang menonjolkan peranan parlemen serta partai-partai dan yang karena itu dapat dinamakan Demokrasi Parlementer.
- b. Masa Republik Indonesia II (1959-1965), yaitu masa Demokrasi Terpimpin yang dalam banyak aspek telah menyimpang dari demokrasi konstitusional yang secara formal merupakan landasan, dan menunjukkan beberapa aspek demokrasi rakyat.
- c. Masa Republik Indonesia III (1965-1998), yaitu masa Demokrasi Pancasila yang merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial.

² Taufik Hidayattulloh, 2017, “Perkembangan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Cimahi 2001-2011”, Skripsi.

- d. Masa Republik Indonesia IV (1998-sekarang), yaitu masa reformasi yang menginginkan tegaknya demokrasi di Indonesia sebagai koreksi terhadap praktik-praktik politik yang terjadi pada masa Republik Indonesia III.

Dalam hal ini, fokus utama tertuju pada masa Republik Indonesia IV atau lebih dikenal dengan istilah masa Reformasi. Masa Reformasi ini merupakan suatu langkah maju dalam melangsungkan sistem demokrasi di Indonesia. Era reformasi yang ditandai dengan runtuhnya rezim Orde Baru merupakan era yang memberikan harapan baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik.

Euforia reformasi begitu menghegemoni masyarakat Indonesia terutama pelaku politik praktis. Dengan banyaknya parpol yang bermunculan, pemerintah B.J. Habibie membuat suatu kebijakan baru untuk menerapkan kembali sistem multipartai, sebagaimana pernah terjadi di Indonesia pada dasawarsa pertama pasca kemerdekaan.

Semua perkembangan ini mendorong munculnya sangat banyak parpol, khususnya parpol-parpol Islam. Dari sekitar 140-an parpol yang berdiri di masa Habibie, dan kemudian setelah mengalami seleksi ketat terdapat 48 parpol yang berhak mengikuti pemilu 1999. Dan dari 48 parpol ini hampir separuhnya adalah parpol yang secara eksplisit merupakan partai Islam atau menggunakan simbolisme Islam, atau partai berbasis konstituen muslim.³ Euforia Reformasi ini kemudian mendapat respon umat Islam sehingga muncullah partai Islam yang eksklusif seperti PPP dan PKS. Partai Inklusif yang berbasis konstituen muslim seperti PKB.

³ Taufik Hidayattulloh, 2017, “Perkembangan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Cimahi 2001-2011”, Skripsi.

Adapun yang menjadi inti pengkajian kali ini ialah Partai Kebangkitan Bangsa yang menjadi salah satu partai yang lahir di masa Reformasi. Partai politik yang difasilitasi oleh PBNU dan dipelopori oleh Gus Dur dan Matori Abdul Djali.

PKB yang dideklarasikan pada 23 Juli 1998 ini, satu satunya partai Islam yang lahir dari kalangan ulama yang di kenal dengan sebutan Nadhatul Ulama. Sebuah nama, kebangkitan Bangsa, yang di ambil dari terjemahan salah satu pilar dari tiga pilar ‘pra organisasi NU’ yaitu Nahdatul al-Wathan (kebangkitan Bangsa).⁴ Meski demikian, bukan berarti elit-elit politik NU dipastikan menyalurkan semua kepentingan berpolitiknya terhadap partai yang dipelopori Gus Dur ini. Sebagaimana hasil Muktamar NU ke-28 tahun 1989 tepatnya 25-28 November 1989 di Yogyakarta, telah membuahakan sembilan pedoman berpolitik bagi warga NU yakni:

Pertama, berpolitik bagi NU mengandung arti keterlibatan warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara menyeluruh sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. *Kedua*, politik bagi NU adalah politik yang berwawasan kebangsaan dan menuju integrasi bangsa dengan langkah-langkah yang semestinya menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan untuk mencapai cita-cita bersama, yaitu terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur lahir dan batin, dan dilakukan sebagai amal ibadah menuju kebahagiaan di dunia dan kehidupan di akherat. *Ketiga*, politik bagi NU adalah pengembangan nilai-nilai kemerdekaan yang hakiki dan demokratis, mendidik kedewasaan bangsa untuk menyadari hak, kewajiban dan tanggung jawab untuk mencapai kemaslahatan bersama. *Keempat*, berpolitik bagi NU haruslah dilakukan dengan moral, etika, dan budaya yang berketuhanan Yang Maha Esa, berperikemanusiaan yang adil dan beradab, menjunjung tinggi bersatuan Indonesia, berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan,

⁴ Taufik Hidayattulloh, 2017, “ Perkembangan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Cimahi 2001-2011”, Skripsi.

dan berkeadilan. *Kelima*, berpolitik bagi NU haruslah dilakukan dengan kejujuran nurani dan moral agama, konstitusional, adil, sesuai dengan peraturan dan norma-morma yang disepakati, serta dapat mengembangkan mekanisme musyawarah dalam memecahkan masalah bersama. *Keenam*, berpolitik bagi NU dilakukan untuk memperkokoh konsesus-konsesus nasional, dan dilaksanakan sesuai ahlakul karimah sebagai pengamalan ajaran Islam *Ahlusunah wal Jama'ah*. *Ketujuh*, berpolitik bagi NU, dengan alasan apapun tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan kepentingan bersama dan memecah belah persatuan. *Kedelapan*, perbedaan pandangan diantara aspirasi-aspirasi politik warga NU harus tetap berjalan dalam suasana persaudaraan, tawadlu dan saling menghargai satu sama lain, sehingga di dalam berpolitik itu tetap dijaga persatuan dan kesatuan di lingkungan NU. *Kesembilan*, berpolitik bagi NU menuntut adanya komunikasi kemasyarakatan timbal balik dalam pembangunan nasional untuk menciptakan iklim yang memungkinkan perkembangan organisasi kemasyarakatan yang lebih mandiri dan mampu melaksanakan fungsinya sebagai sarana masyarakat untuk berserikat, menyalurkan aspirasi serta berpartisipasi dalam pembangunan.

Berdasarkan kesembilan berpolitik elit-elit politik NU menyalurkan kepentingan masing-masing lewat partai-partai, sesuai dengan pilihan dan keinginannya.⁵ Namun secara tidak langsung berkepihakan warga NU terhadap partai yang dipelopori Gus Dur ini terlihat begitu dinamis, karena PKB dianggap dapat merangkul kepentingan berpolitik warga NU.

Partai politik memiliki arti yang sangat penting dan telah menjadi fenomena umum dalam kehidupan politik yang demokratis. Dalam kehidupan politik modern keberadaan partai politik menjadi keharusan. Sebab fungsi utama partai politik adalah bersaing untuk memenangkan pemilu, mengagregasikan berbagai kepentingan masyarakat, menyediakan

⁵ Taufik Hidayattulloh, 2017, “Perkembangan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Cimahi 2001-2011”, Skripsi.

alternatif kebijakan, dan mempersiapkan para calon pemimpin yang akan duduk dalam pemerintahan.

Partai politik atau parpol merupakan perkumpulan segolongan orang-orang yang seasas, sehaluan, setuju terutama dibidang politik. Baik yang berdasarkan partai kader atau struktur kepartaian yang dimonopoli oleh sekelompok anggota partai yang terkemuka, maupun yang berdasarkan partai massa, yaitu partai politik yang mengutamakan kekuatan berdasarkan keunggulan jumlah anggotanya. Dalam KBBI parpol juga berarti perkumpulan yang didirikan untuk mewujudkan ideologi politik tertentu.

Dalam Undang-Undang RI nomor 31 Tahun 2002 Pasal 1 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan partai politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum.⁶

Terminologi partai politik, menurut Palge Jhonson Tan dan juga Giovanni Sartori, ialah kelompok politik apa saja yang ikut serta dalam pemilu dan mampu menempatkan orang-orangnya dalam jabatan-jabatan publik. Tujuan didirikannya partai politik adalah untuk merai jabatan politik, mendapatkan kekuasaan politik, dan mengontrol proses perumusan kebijakan. Partai politik dengan demikian menjadi sarana penghubung kepentingan rakyat dan pembuat kebijakan dalam pemerintahan demokrasi.

Partai politik juga merupakan organisasi yang berhubungan dengan kekuasaan melalui cara pemilihan yang demokrasi. Oleh karena itu partai politik bekerja melalui mekanisme perwakilan rakyat DPR. Berbeda dengan kelompok penekan, kelompok ini bekerja

⁶ Mela Komalawati, 2008, "Perkembangan Partai Kebangkitan Bangsa di Kota Bandung", Skripsi.

tidak ada kaitannya dengan dua mekanisme demokrasi tersebut yaitu pemilihan dan perwakilan.⁷ Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisasi yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik. Dan merebut kedudukan politik biasanya dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijaksanaan mereka.⁸

Yang dimaksudkan dengan partai politik pada hakekatnya suatu organisasi yang terdiri dari sekelompok orang yang mempunyai cita-cita, tujuan-tujuan dan orientasi-orientasi yang sama, dimana organisasi ini berusaha untuk memperoleh dukungan dari rakyat dalam rangka usahanya memperoleh kekuasaan dan kemudian mengendalikan atau mengontrol jalannya roda pemerintahan. Yang kesemuanya itu pada gilirannya sebagai pangkat tolak organisasi tersebut dalam usahanya merealisasikan atau melaksanakan program-programnya yang telah ditetapkan.⁹

Adanya partai politik di negara-negara dunia ini mempunyai alasan yang kuat. Di negara-negara yang menganut paham demokrasi didasarkan atas suatu anggapan bahwa seluruh warga negara tanpa terkecuali mempunyai hak yang sama untuk berpartisipasi dalam bidang politik, dan untuk menampung partisipasi warga negara tersebut maka dibentuk partai politik. Sedangkan di negara-negara yang menganut paham totaliter, keberadaan partai politik didasarkan atas suatu anggapan bahwa seluruh warga negara tanpa terkecuali perlu mendapatkan bimbingan, pengarahan dan pembinaan untuk berpartisipasi dalam bidang politik, dan untuk membimbing, mengarahkan dan membina warga negara dalam rangka

⁷ Mela Komalawati, 2008, "Perkembangan Partai Kebangkitan Bangsa di Kota Bandung", Skripsi.

⁸ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002), Hal. 160-161.

⁹ *Ibid*, hal. 161.

berpartisipasi politik tersebut diperlukan suatu wadah atau sarana yang memadai, yaitu partai politik.¹⁰ Partai politik pertama-tama terlahir di negara Eropa Barat. Dengan meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diperhitungkan serta diikutsertakan dalam proses politik, maka partai politik telah lahir secara spontan dan berkembang menjadi penghubung antara rakyat di satu pihak dan pemerintah di pihak lain.¹¹

Dalam sistem politik yang demokratis, partai politik memiliki peranan yang penting terutama dalam rangka proses konsolidasi demokrasi. Karena itu, ketika demokrasi berkembang ke seluruh penjuru dunia pada 1990-an, peran partai politik mengalami pengembangan yang pesat pula. Peran penting partai politik ini semakin nyata ketika demokratisasi semakin meluas ke negara-negara berkembang antara 1970-an sampai 1990-an. Periode ini oleh Huntington disebut sebagai gelombang ketiga demokrasi.¹²

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Proses Berdirinya Partai Kebangkitan Bangsa di Kota Bandung ?
2. Bagaimana Perkembangan Partai Kebangkitan Bangsa di Kota Bandung dari Tahun 1998 sampai dengan 2004?
3. Apakah Kontribusi PKB Bandung terhadap Misi Kota Bandung Tahun 1998-2004?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Proses Berdirinya Partai Kebangkitan Bangsa di Kota Bandung
2. Untuk Mengetahui Perkembangan Partai Kebangkitan Bangsa di Kota Bandung dari Tahun 1998 sampai dengan 2004

¹⁰ *Ibid*, hal. 162.

¹¹ Haryanto, *Partai Politik Suatu Tinjauan Umum*, (Yogyakarta: Liberty, 1984), hal. 9.

¹² *Ibid*, hal. 3

3. Untuk Mengetahui Kontribusi PKB Bandung terhadap Misi Kota Bandung Tahun 1998-2004.

D. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini, dikumpulkan sumber-sumber pustaka yang tentu berkaitan dengan topik. Sumber-sumber yang berkaitan dengan Partai Politik yang penulis simak ada yang sudah di tulis dan ada juga yang belum. Diantaranya sumber yang berhubungan dengan Partai Politik yang akan penulis bahas adalah :

1. Buku Abdurrahman Wahid, 2000, *Membangun Demokrasi*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya.
2. Buku A.Effendy Choirie, 2002, *PKB Politik Jalan Tengah NU*, Jakarta, Pustaka Ciganjur.
3. Buku Kuntowijoyo, 1995. *Pengantar Ilmu Sejarah* , Jogjakarta. Yayasan Benteng Budaya.
4. Buku Miftah Thoha. 2003. *Birokrasi dan Politik di Indonesia* , Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
5. Buku Miriam Budiardjo. 2002. *Dasar-Dasar Ilmu Politik* , Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama.

Adapun sumber-sumber Skripsi diantaranya :

1. Mela Komalawati, *Perkembangan Partai Kebangkitan Bangsa di Kota Bandung Tahun 1998-2004*.
2. Taufik Hidayatulloh, *Perkembangan Partai Kebangkitan Bangsa di Kota Cimahi 2001-20011*.

E. Langkah-langkah penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode sejarah yang dalam tahapannya mempunyai empat tahapan yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan yang terakhir yaitu historiografi.¹³

1) Heuristik

Dalam tahapan ini penulis berupaya mencari dan mengumpulkan sumber-sumber sejarah sebagaimana yang diungkapkan oleh Budi Sulistiono. Bahwa heuristik ini mengandung makna “mencari lebih dahulu dan menemukan”. Dengan demikian heuristik tidak lain adalah proses mencari untuk menemukan sumber-sumber bagi sejarah.

Dalam tahap ini, sumber-sumber dapat dibedakan menjadi dua tahap di antara lain sumber primer dan juga sumber sekunder. Sumber primer ialah sumber yang dimana sumber itu diperoleh dari pelaku atau aktor sejarah atau orang yang menyaksikan secara langsung kejadian atau terjadinya peristiwa sejarah. Sedangkan sumber sekunder merupakan yang keterangannya diperoleh dari orang yang tidak menyaksikan peristiwa sejarah itu secara langsung.¹⁴ Atau lebih jelasnya adalah merupakan tahapan pengumpulan berbagai informasi yang berhubungan dengan sumber.¹⁵

¹³ Kosim.E, *Metode Sejarah;Asas dan proses*,(Bandung:Fakultas Sastra Universitas Padjajaran,1984). Hlm.36.

¹⁴ Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah, Terjemahan Nuroho Notosusanto*, (Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1985). Hlm. 32-35.

¹⁵ Dudung Abdurrahman, *Metode Penelitian Sejarah*, (Jakarta: Logos, 1999). Hlm. 55.

Menurut bahannya dapat dibagi menjadi dua yaitu tertulis dan tidak tertulis, atau dokumen dan artefak.¹⁶ Sumber-sumber tulisan dan lisan tersebut dibagi menjadi dua jenis yaitu sumber primer dan juga sumber sekunder.¹⁷ Sumber primer adalah sumber-sumber asli sebagai sumber pertama. Sumber asli atau orisinal ini yang kontemporer atau bisa disebut juga sezaman dengan sesuatu peristiwa yang terjadi. Informasinya dapat diperoleh dari seorang saksi baik yang terlibat atau hanya sekedar melihat sesuatu peristiwa itu secara langsung atau alat yang ada pada peristiwa yang diceritakannya, dalam arti lain kesaksiannya tidak berasal dari sumber lain melainkan dari tangan pertama. Sumber ini adalah sumber yang relevan dan signifikan bagi topik penelitian atau tulisan peneliti.

Sedangkan sumber sekunder adalah tulisan yang berdasarkan sumber-sumber pertama. Informasinya merupakan kesaksian dari siapapun yang bukan merupakan saksi pandangan mata yakni dari seseorang yang hadir pada peristiwa yang disaksikannya. Tulisan ini memberi bahan-bahan praktis atau teoritis yang penting bagi penelitian sejarah.

Dalam hal ini dipakai teknik-teknik sebagai berikut :

- a. Kerja lapangan atau observasi ke kantor Partai PKB Jawa Barat
- b. Wawancara dengan masyarakat setempat.

¹⁶ Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah, Terjemahan Nuroho Notosusanto*, (Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1985). Hlm. 95.

¹⁷ Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah, Terjemahan Nuroho Notosusanto*, (Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1985). Hlm. 35.

- c. Studi kepustakaan Sastra Unpad yang berlokasi di Jatinangor, Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, serta Perpustakaan Umum Garut.

Dalam tahapan ini menggunakan dua sumber yaitu sumber primer dan juga sumber sekunder.

- a. Sumber primer

Dalam tahapan ini penulis mengumpulkan sumber sebagai bahan rujukan dalam penulisan penelitian ini, diantaranya :

1. Bapak Maulana Yusuf selaku Wakil Sekertaris DPW PKB Jawa Barat
2. Rizky Gunawan selaku Anggota DPW Kota Bandung

Selain wawancara, penulis juga mendapatkan sumber primer dari dokumen-dokumen dan sumber visual diantaranya berupa :

1. Rekaman Hasil Wawancara
2. Foto Visi dan Misi PKB Kota Bandung
3. Foto bersama Narasumber
4. AD/ART PKB
5. SK (surat Keputusan) PKB

- b. Sumber sekunder

Sedangkan tahapan dalam pengumpulan sumber sekunder ini penulis mengumpulkan sumber sebagai bahan rujukan dalam penulisan penelitian ini, diantaranya:

1. Miriam Budiardjo. 2002. DASAR-DASAR ILMU POLITIK, Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama.
2. A.Effendy Choirie, 2002, PKB POLITIK JALAN TENGAH NU, Jakarta, Pustaka Ciganjur.

2) Kritik

Tahapan kritik adalah tahapan atau kegiatan meneliti sumber, informasi, jejak tersebut dengan cara menguji kebenaran yang sedang diteliti secara kritis.¹⁸ Setelah berhasil mengumpulkan data, tahapan selanjutnya adalah mengkritik tentang data-data yang mengandung sumber sejarah, kemudian mempelajari sumber itu, memahaminya dan mengambil kesimpulan realita-realita dari sumber tersebut. Dalam tahapan ini adalah menguji keabsahan sumber atau autensitas yang dilakukan melalui kritik ekstern, dan keabsahan tentang kredibilitas yang dilakukan melalui kritik intern.¹⁹

A. Kritik Ekstern

Dalam tahapan pengumpulan sumber-sumber, penulis dalam penulisan penelitian ini sudah mendapatkan keabsahan sumber asli atau tidaknya, diantaranya :

1. Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Politik, ini merupakan salinan dari sumber aslinya, karena peneliti hanya bisa fotocopy dari Perpustakaan
2. A. Effendy Choirie, PKB Politik Jalan Tengah NU, ini merupakan salinan dari sumber aslinya, karena peneliti hanya bisa fotocopy dari perpustakaan

B. Kritik Intern

¹⁸ Kosim. E, *Metode Sejarah; Asas dan Proses*. (Bandung: Fakultas Sastra Universitas Padjadjaran, 1984). Hlm. 36.

¹⁹ Hasan Usman, *Metode Penelitian Sejarah, Terjemahan A. Muin Umar et al.* (Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama Islam/IAIN Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1986). Hlm. 80.

Dalam tahapan pengumpulan sumber-sumber, penulis dalam penulisan penelitian ini sudah mendapatkan kredibilitas sumber atau dapat dipercaya tidaknya sumber tersebut dan sebagai berikut :

1. Keterangan tertulis dari Miriam Budiardjo, berisikan tentang bagaimana Dasar-Dasar Ilmu Politik itu sendiri.
2. Keterangan tertulis dari A. Effendy Choirie, berisikan tentang PKB dan Politik itu menjadi jalan tengahnya organisasi masyarakat NU.

3) **Interpretasi**

Dalam tahapan ini yang pertama-tama dilakukan adalah menemukan jenis pendekatan yang digunakan. Adapun penulisan ini termasuk kedalam Tradisi Budaya sunda yang menggunakan pendekatan sosial. Pendekatan sosial melihat dari segi-segi sosial dari peristiwa yang dikaji seperti golongan peristiwa yang berperan, nilai-nilai yang mengikat, hubungan dengan golongan lain dan sebagainya.

Partai Politik merupakan wadah atau sarana bagi warga negara dalam turut serta untuk berpartisipasi dalam proses pengelolaan Negara. Selain itu, Partai Politik juga merupakan sarana partisipasi politik masyarakat dalam mengembangkan kehidupan demokrasi untuk menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab.

Dewasa ini partai politik menjadi suatu keharusan dalam kehidupan politik modern yang demokratis. Sebagai suatu lembaga, partai politik pada hakikatnya dimaksudkan untuk memobilisasi rakyat, mewakili kepentingan tertentu, memberikan jalan kompromi bagi pendapat yang saling bersaing, serta menyediakan sarana sukses kepemimpinan politik secara absah dan damai.

Partai politik secara umum dikatakan sebagai satu kelompok yang terorganisir yang didalamnya diisi oleh anggota-anggota yang mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Dengan tujuan yang sama pula yaitu untuk memperoleh kekuasaan politik dan melalui kekuasaan itu, elemen politik melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka. Karena itu, partai politik dalam pengertian modern dapat didefinisikan sebagai kelompok atau organisasi yang mengajukan calon-calon untuk dijadikan menjadi pejabat publik yang dipilih oleh rakyat sehingga mengontrol atau mempengaruhi segala tindakan pemerintah.

Carl Frienrich memberi batasan partai politik sebagai kelompok manusia yang terorganisasi secara stabil dengan tujuan untuk membuat atau mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan.

Keberadaan partai politik bukan hanya sebagai sarana masyarakat dalam berpartisipasi politik, melainkan dapat berfungsi sebagai sarana untuk mempersiapkan, memunculkan dan melahirkan pemimpin politik, bangsa dan negara.

Dengan demikian, partai politik merupakan perantara yang menghubungkan ideologi-ideologi sosial dan kekuatan-kekuatan politik terhadap lembaga-lembaga pemerintah yang resmi secara lebih luas.

4) **Historiografi**

Tahapan terakhir ini, penulis memaparkan hasil penelitian dalam bentuk tulisan karya ilmiah. Historiografi berarti pelukisan sejarah, gambaran sejarah tentang

peristiwa yang terjadi pada waktu yang telah berlalu yang disebut sejarah.²⁰ Pada tahapan ini digunakan jenis penulisannya adalah deskripsi analisa yaitu jenis penulisannya yang menggunakan fakta-fakta guna menjawab pertanyaan apa, bagaimana, kapan, dimana, siapa dan juga mengapa. Maka penulis menuliskannya menjadi sebuah sejarah secara sistematika dan selaras. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

BAB I pada tahapan ini didalamnya terdapat pendahuluan yang didalamnya terdapat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan dan juga langkah-langkah penulisan.

BAB II menjelaskan tentang Proses Berdirinya Partai Kebangkitan Bangsa di Kota Bandung Tahun 1998.

BAB III menjelaskan Perkembangan Partai Kebangkitan Bangsa di Kota Bandung Tahun 1998-2004

BAB IV menyampaikan kesimpulan yang bahasanya diambil dari pokok-pokok dan bahasan ini.

UIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

²⁰ Ismaun, *sejarah Sebagai Ilmu*, (Bandung: Historia Utama Press, 2005), hlm.23.